

ABSTRAK

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung)

Oleh

NADINDA YUAZ ZAHRA

Pada tahun 2019-2023 terdapat beberapa permasalahan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandar Lampung, seperti halnya konflik internal dan eksternal ormas. Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap ormas penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah kegiatan yang sebenarnya sesuai dengan rencana yang telah di buat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung terhadap ormas. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Siagian (2005) dengan indikator penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan melakukan tindakan koreksi yang kemudian di kombinasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas jenis pengawasan internal dan eksternal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dan sudah memenuhi ketiga indikator. Adapun yang menyebabkan kurangnya pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas adalah pada indikator pengukuran kegiatan, yaitu Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung tidak melakukan pengawasan setiap enam bulan sekali, melainkan melakukan satu kali pengawasan terhadap ormas dalam setahun, hal tersebut dikarenakan kurangnya keseriusan dalam melakukan pengawasan terhadap ormas.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan.

ABSTRACT

REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION OF MASS ORGANIZATIONS IN BANDAR LAMPUNG CITY (STUDY OF THE NATIONAL UNITY AGENCY AND POLITICS OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By

NADINDA YUAZ ZAHRA

In 2019-2023 there were several problems with Mass Organizations (Ormas) in Bandar Lampung City, such as internal and external conflicts with mass organizations. It is important to monitor mass organizations by the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) to find out whether the actual activities are in accordance with the plans that have been made. The aim of this research is to determine the supervision carried out by the Bandar Lampung City Kesbangpol Agency on mass organizations. This research uses supervision theory according to Siagian (2005) with indicators of setting standards, measuring activities, and carrying out corrective actions which are then combined with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 56 of 2017 concerning supervision of mass organizations, types of internal and external supervision. This research was conducted using qualitative methods and using data collection techniques through interviews, documentation and observation. The results of this research show that local government supervision of community organizations in Bandar Lampung City is already underway and has met the three indicators. What causes the Kesbangpol Agency's lack of supervision of mass organizations is the activity measurement indicators, namely the Bandar Lampung City Kesbangpol Agency does not carry out supervision every six months, but instead carries out supervision of mass organizations once a year, this is due to a lack of seriousness in carrying out supervision of mass organizations.

Keywords: Supervision, National and Political Unity Bodies, Mass Organizations